



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 37 TAHUN 1958  
TENTANG  
PENETAPAN BAGIAN IX (KEMENTERIAN PENERANGAN)  
DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955

Presiden Republik Indonesia,

Mengingat : Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara Republik  
Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Pasal 1.

Bagian IX. Bab I (Pengeluaran) dari anggaran Republik Indonesia untuk  
tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Penerangan ditetapkan seperti  
berikut:

BAGIAN IX  
KEMENTERIAN PENERANGAN.

BAB I (Pengeluaran).

9.1	Kementerian dan pengeluaran umum .....	25.374.000
9.2	Perusahaan Film .....	15.918.000
9.3	Distribusi Film .....	Memori
9.4	Radio .....	29.955.000
9.5	Propinsi-propinsi .....	67.269.000
9.6	Pengeluaran tidak tersangka .....	Memori
	Jumlah .....	138.516.000

(Seratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu rupiah).

Pasal 2. ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## Pasal 2.

Bagian IX, Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Penerangan ditetapkan sebagai berikut:

### BAB II (Penerimaan).

#### 9.1 KEMENTERIAN DAN PENERIMAAN UMUM.

##### 9.1.1 Kementerian.

##### 9.1.1. 1 Pendapatan dari mempersewakan ruangan.

##### 2 Pendapatan dari penginapan wartawan-wartawan luar negeri.

##### 3 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran, mengenai keperluan pegawai.

##### 9.1.2 Penerimaan umum.

##### 9.1.2. 1 Pembayaran kembali persekot-persekot.

##### 2 Pendapatan dari penjualan brosur-brosur dan lain-lain penerbitan.

##### 3 Pendapatan dari sertipikat-sertipikat deviden.

##### 4 Pendapatan dari penjualan potret.

##### 5 Pendapatan dari mempersewakan film-film.

##### 6 Pembayaran kembali dari subsidi majalah-majalah/surat-surat kabar.

##### 7 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.

##### 8 Pendapatan dari percetakan-percetakan kecil.

#### 9.2 PERUSAHAAN FILM.

##### 9.2.1 Perusahaan Film Negara.

##### 9.2.1. 1 Pendapatan dari penjualan dan penyewaan film.

##### 2 Pendapatan dari mempersewakan ruangan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.

### 9.3 DISTRIBUSI FILM.

9.3.1 Jawatan Distribusi Film dalam likwidasi.

9.3.1. 1 Pendapatan dari penyewaan film-film Jawatan Distribusi Film Negara dalam Rwidasi.

### 9.4 RADIO.

9.4.1 Jawatan Radio.

9.4.1. 1 Pendapatan dari mempersewakan ruangan.

2 Pendapatan dari langganan dan adptensi penerbitan dan lain-lain.

3 Pendapatan dari pertunjukan umum, sayembara pendengar, konkurs musik dan nyanyi dan lain-lain.

4 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.

### 9.5 PENERIMAAN RUPA-RUPA.

9.5.1 PENERIMAAN rupa-rupa.

9.5.1. 1 Penjualan barang-barang yang digunakan dan dipakai untuk Pemerintah.

2 Penjualan barang-barang yang tidak dipakai dan tidak berguna.

3 Penerimaan lain-lain.

### Pasal 3.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1955.

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juni 1958.  
Presiden Republik Indonesia,  
ttd  
SOEKARNO.

Diundangkan  
pada tanggal 17 Juli 1958,  
Menteri Kehakiman,  
ttd  
G.A. MOENGGOM.

Menteri Penerangan,  
ttd  
SUDIBJO.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1958 NOMOR 87

#### CATATAN

Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada tanggal 2 Nopember 1956, pada hari Jum'at, P.41/1956